

## **Difusi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada Individu: Refleksi Terhadap Metode Penelitian Difusi**

**Mami Hajaroh**

Prodi Kebijakan Pendidikan

FIP UNY

mami\_hajaroh@yahoo.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model difusi kebijakan pengarusutamaan gender pada individu dan menghasilkan metode penelitian yang tepat untuk penelitian difusi kebijakan pengarusutamaan gender dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan subyek penelitian anggota Fatayat Nahdlatul Ulama. Data dikumpulkan dengan interview mendalam. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi tema-tema. Análisis data menggunakan *Interpretive Phenomenology Analysis (IPA)* dan *Event History Analysis (EHA)*. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dengan teknik *snow ball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model difusi kebijakan pada individu ditemukan dengan tahap pengetahuan, persuasi, konfirmasi, keputusan dan implementasi. Penelitian difusi kesetaraan dan keadilan gender pada individu dimaksudkan untuk memahami secara mendalam proses adopsi kebijakan atau gagasan baru. Penelitian difusi pada individu merupakan proses kompleks yang membutuhkan kajian interdisipliner berbagai bidang ilmu. Melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat mengeksplorasi proses mental pada setiap individu. Dengan menggunakan analisis fenomenologi interpretatif (*Interpetative Fenomenology Analysis*) peneliti dapat menemukan tema-tema yang muncul dalam proses mental individu. Individu sebagai unit analisis dalam penelitian difusi menjadi keharusan karena individu atau orang merupakan salah satu dari tiga dimensi dalam implementasi kebijakan disamping tempat dan kebijakan.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Fatayat NU, Difusi, Adopsi, Kebijakan,

## **Gender Mainstreaming Policy Diffusion in the Individual: Reflections on Diffusion Research Methods**

**Mami Hajaroh**

Yogyakarta State University

mami\_hajaroh@yahoo.com

### **Abstract**

This research aims to find the diffusion model of gender mainstreaming policies in individual and to produce research methods appropriate for studies on the diffusion of gender mainstreaming policies using qualitative approach. This study using qualitative phenomenology research approach. The subjects were members of Fatayat of Nahdlatul Ulama. Data collected by in-depth interviews. Data validation is done by triangulation of themes. The data analysis was using *Interpretive Phenomenology Analysis* (IPA) an Event History Analysis (EHA). The sampling was done purposively with a snow ball sampling technique. The results of the research showed that the model of policy diffusion at the individual was found with stage of knowledge, persuasion, confirmation, decision and implementation. Diffusion research of gender equality and equity on individual meant to understand deeply on the process of adoption of new policies or new ideas. Diffusion in individuals is a complex process that requires an interdisciplinary study of various disciplines. Through a qualitative approach, the researcher can explores the mental processes on each individual. By using Interpretative Phenomenological Analysis researcher can find the themes that emerged in the individual mental processes. The individual as the unit of analysis in diffusion research becomes an imperative because the individual or the person is one of the three dimensions of policy implementation besides the place and policies.

**Keywords:** Gender Mainstreaming, Fatayat NU, Diffusion, Adoption, Policies

## **Pendahuluan**

Kebijakan merupakan arah tindakan yang disusun untuk memberikan perubahan pada masyarakat ke arah yang lebih baik. Baik perubahan dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, ekonomi, politik, maupun perubahan masyarakat yang lebih luas. Kebijakan baru sebagai upaya memberikan perubahan dapat disebut sebagai inovasi karena di dalamnya terdapat gagasan baru yang dengannya menjadi pangsak tolak terjadinya perubahan. Difusi kebijakan baru (inovasi) kepada masyarakat pengguna inovasi menjadi sesuatu yang penting, tetapi difusi inovasi sering tidak semudah dan selancar pembuatan kebijakan (penciptaan inovasi). Jika perubahan dalam masyarakat diinginkan terjadi dengan adanya kebijakan baru maka difusi menjadi sarana yang paling menentukan dalam perubahan masyarakat. Dalam pembangunan pasti mengharapkan masyarakat berubah maju dengan difusi inovasi yang diinginkan.

Kebijakan pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) merupakan kebijakan global sebagai strategi pembangunan merupakan inovasi kebijakan dalam rangka perubahan kehidupan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender di deklarasikan pada tahun 2000 di Beijing. Strategi pengarusutamaan gender didifusikan melintas negara sampai ke Indonesia dan di adopsi dengan dikeluarkan Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam Pembangunan Nasional pada Tanggal 19 Desember 2000. Kebijakan pengarusutamaan gender menuntut peran perempuan yang lebih besar dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif. Keberhasilan strategi pengarusutamaan gender dalam mengubah kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh difusi yang dilakukan.

Ketika memberikan perubahan melalui difusi membutuhkan pendekatan atau strategi yang tepat dan berjalan dari waktu-waktu. Dengan strategi yang tepat dan relevan dengan sasaran difusi yakni individu-individu dalam organisasi atau lembaga maka kebijakan baru atau inovasi akan diterima. Difusi yang dilakukan pada individu diharapkan berdampak pada organisasi atau lembaganya. Untuk bisa meneliti mengenai

difusi kebijakan pengarusutamaan gender pada individu dan organisasi juga memunculkan permasalahan mengenai apa dan bagaimana metode penelitian difusi yang akan digunakan mengingat penelitian difusi merupakan bagian dari pendekatan *R, D and D (Research, Development and Difusion)* belum banyak dikembangkan.

Studi difusi dan inovasi kebijakan telah diadopsi oleh Walker (1969:881) dengan mendefinisikan inovasi kebijakan adalah sebuah program atau kebijakan yang baru diadopsi oleh suatu pemerintahan. Tidak dipentingkan apakah kebijakan itu sudah lama ataupun sudah banyak diadopsi oleh pemerintah negara-negara lain. Dengan demikian perubahan kebijakan dipandang sebagai baru dalam pemerintahan yang menetapkan perubahan, sekalipun perubahan telah diadopsi oleh pemerintah negara-negara lainnya. Sedangkan Rogers (1995, 2003:12) menyebutkan bahwa inovasi adalah suatu ide, praktek atau obyek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lain. Inovasi menurut Havelock (tth: 2-1) adalah membuat keputusan perubahan dan dengan sikap penuh harapan untuk memperbaiki cara melakukan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang baru.

Pengarusutamaan gender (PUG) sebagai kebijakan baru merupakan inovasi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan telah digugat karena dipandang relasi antara keduanya telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lebih banyak berdampak negatif terhadap perempuan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan guna mengatasi masalah tersebut dengan tujuan keadilan dan kesetaraan gender. Strategi pembangunan pengarusutamaan gender ini untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan : 1) Berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan; 2) Mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya; 3) Memiliki peluang yang sama dalam melakukan kontrol terhadap pembangunan; 4) Memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan. Dengan strategi pengarusutamaan gender maka kesenjangan gender dapat dipersempit bahkan ditiadakan sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi pengarusutamaan gender (*Minister of Women Empowerment, 2002: 8*) diperluas pada responsif gender (*Gender-Responsif*) dalam pengembangan kebijakan, program, proyek, dan aktifitas yang mempersempit kesenjangan gender yang mendorong pada perwujudan kesetaraan dan keadilan gender (*equality and equity gender*). Responsif gender adalah perencanaan yang disusun dengan mengintegrasikan pengalaman-pengalaman, cita-cita, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda dari laki-laki dan perempuan dalam proses formulasi kebijakan. Untuk itu dalam menyusun perencanaan yang responsif gender, penting untuk melengkapinya dengan analisis gender pada setiap pengembangan kebijakan, program, proyek dan aktifitas. Makna dari kebijakan adalah semua kebijakan dan makro, kebijakan nasional, kebijakan propinsi dan kebijakan regional.

Difusi menurut Rogers (1995,2003:5-6) adalah proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu pada anggota-anggota dari sebuah sistem sosial. Difusi merupakan suatu tipe yang spesial dari komunikasi pesan yang berkaitan dengan ide-ide baru. Disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Jelas disini bahwa istilah difusi tidak terlepas dari kata inovasi. Karena tujuan utama proses difusi adalah diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi dan atau sub sistem. Difusi inovasi ini terjadi dalam suatu sistem sosial yang didalamnya terdapat struktur sosial, individu atau kelompok individu, dan norma-norma tertentu. Secara teoritis teori difusi inovasi menggambarkan pola-modeladopsi, menjelaskan mekanisme terjadinya inovasi dan membantu memprediksi apakah difusi akan berhasil.

Berkaitan dengan itu Damanpour (1996: 694) menyatakan bahwa inovasi dapat dipelajari pada level firma, industri atau level individual. Inovasi pada level organisasi didefinisikan sebagai adopsi ide-ide atau perilaku baru bagi organisasi pengadopsi (Daft 1978, Damanpour and Evan 1984). Adopsi inovasi mengandung arti sebagai

sebuah proses dikembangkan dan diimplementasikannya ide-ide dan perilaku baru yang masuk pada satu generasi. Inovasi selain bermakna perubahan pada organisasi, juga sebuah respon perubahan pada lingkungan eksternal organisasi. Inovasi didefinisikan secara luas dengan menekankan pada beberapa tipe, termasuk produk atau layanan baru, teknologi baru, dengan struktur organisasi atau sistem administrasi atau yang berkaitan dengan rencana-rencana dan program baru pada organisasi .

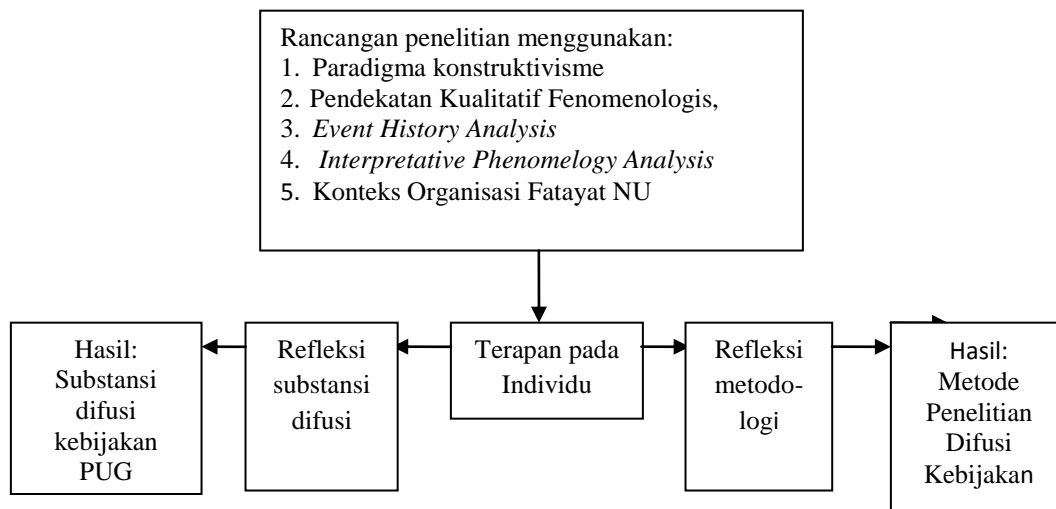
Secara umum terdapat dua klasifikasi besar dalam penelitian difusi inovasi yakni level makro (*Macro-Level/Aggregate*) dan (*Micro Level/Individual*). makro adalah difusi yang menguji agregasi pasar dan asumsi homogenitas dalam populasi adopter. Sedangkan secara spesifik fokus pada perilaku adopter individual dan diasumsikan bahwa adopsi inovasi mendasar pada setiap individu yang berbeda dan individu adalah personal yang pelik (Yalcinkaya, 2007: 10). Mengenai tahapan dalam proses memutuskan untuk menerima inovasi (adopsi inovasi) pada level individu, Rogers (1995, 2003: 168-179) menjelaskan dalam 5 tahap yakni: dan *knowledge, persuasion, decision, implementation* dan *confirmation*.

Dalam studi kontemporer tentang implementasi kebijakan memiliki 3 dimensi yakni kebijakan, orang-orang dan tempat (*policy, people, place*). Dimensi-dimensi ini bertujuan untuk mengungkap perbedaan-perbedaan level analistik yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Honig, 2006:14). Dimensi-dimensi dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Honig tersebut dapat digunakan dalam memahami dimensi difusi kebijakan. Tiga dimensi implementasi (*policy, people, place*) secara bersama-sama membentuk kerangka pemikiran sebagai proses dari situasi dan sangat tidak terduga. Dalam penelitian ini menyelidiki individu-individu (*people*) yang merupakan salah satu dimensi dari implemtasi kebijakan. Individu sebagai target formal dari difusi kebijakan pengarusutamaan gender dalam organisasi Fatayat NU. Individu-individu yang menjadi target formal ini dapat menjadi kunci bagi implementasi kebijakan PUG dalam organisasi Fatayat NU.



Subyek penelitian adalah anggota Fatayat NU yang duduk dalam kepemimpinan pada tingkat cabang, wilayah dan pimpinan pusat yang ditentukan dengan sampel teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan teknik bola salju (*snow ball sampling*). Obyek penelitian adalah difusi kebijakan pengarusutamaan gender pada individu-individu. Teknik pengumpulan data menggunakan *in depth interview* (interview mendalam) kepada subyek penelitian.

Penelitian dimulai dari rancangan awal penelitian yang disusun dilaksanakan di lapangan dan dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dalam dua aspek, pertama Selain itu analisis substantif difusi kebijakan pengarusutamaan gender pada individu menghasilkan refleksi substansi difusi kebijakan. Hasil refleksi substantif ini dituangkan dalam bentuk model Difusi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada individu. Kedua, refleksi terhadap penelitian difusi kebijakan pada individu untuk menemukan metode penelitian difusi yang relevan. Di bawah ini kami gambarkan alur penelitian.



Gambar 2. Alur Penelitian Difusi kebijakan Pengarusutamaan Gender



## **Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

Hasil penelitian ini meliputi dua dimensi yakni model difusi kebijakan PUG pada individu dan refleksi terhadap metode penelitian difusi kebijakan. Hasil penelitian dan pembahasana sebagai berikut:

### **1. Difusi Kebijakan pada Individu.**

Difusi dalam penelitian ini merupakan proses mengkomunikasikan kebijakan Pengarusutamaan Gender kepada individu-individu pengurus yang ditokohkan dalam organisasi Fatayat NU dari tahun 1995 – 2010. Tujuan dilakukannya difusi adalah agar inovasi dalam hal ini kebijakan pengarusutamaan gender diadopsi oleh individu. Adapun tahapan difusi kebijakan pengarusutamaan gender yang terjadi pada individu-individu sebagai berikut:

#### **a. Bingung, Ragu-ragu, Kaget, dan Merasa Tercerahkan dengan**

Individu-individu dalam penelitian ini nampak terbuka terhadap informasi tentang kesetaraan dan keadilan gender. Membaca yang dilakukan oleh Marhamah, Amanah, dan Ariyati mengawali pengenalan mereka dengan isu-isu gender dan memberikan kepada mereka kesadaran pengetahuan adanya masalah dalam relasi laki-laki dan perempuan. Buku-buku yang membahas tentang gender seperti tulisan Farid Mas'udi, Mansur Fakih, Ashghar Ali, dan novel perempuan berkalung surban nampak memberikan kontribusi dalam menumbuhkan kesadaran pengetahuan tentang gender.

Terbuka terhadap informasi ditunjukkan juga oleh individu-individu dengan kesediaan mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik dari Fatayat NU sendiri, elemen lain dari NU bahkan dari pihak luar, seperti pelatihan oleh KPI, YKF, P3M, LKPSM, dan LSIP serta *Ford Fondation* dan *The Asia Foundation* yang berasal dari Luar Negeri. Riana, Titis, Labibah, Titi Amah, Susiana, Rosa, maupun Isani pertamakali mendapat informasi tentang

kesetaraan dan keadilan gender secara lebih mendalam dari pelatihan yang mereka ikuti.

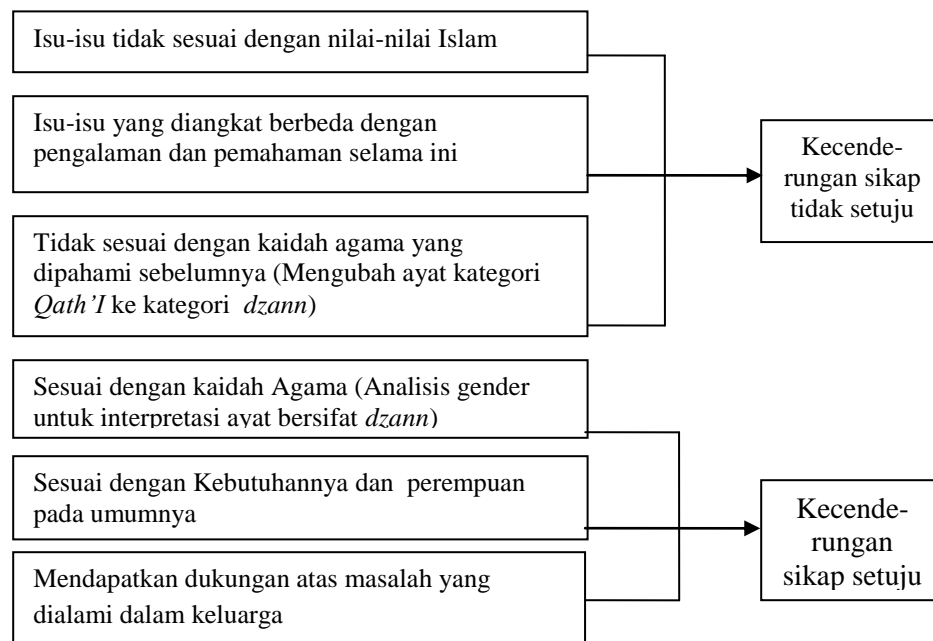
Respon awal yang diberikan cukup bervariasi dari bingung, ragu-ragu, menolak, takut, dan ada juga yang langsung menerima karena gagasan kesetaraan dan keadilan gender dirasakan sebagai sesuatu yang baik, memberikan peluang dan memberikan pencerahan pada diri mereka. Keterbukaan terhadap informasi menjadi awal yang cukup menentukan bagi diadopsinya kesetaraan dan keadilan pada setiap individu. Hal ini sejalan dengan teori difusi inovasi pada individu bahwa kesadaran pengetahuan terjadi ketika individu atau unit pembuat keputusan terbuka pada keberadaan inovasi dan menambahkan pemahamannya pada bagaimana fungsi inovasi tersebut (Rogers 2003: 169). Pengetahuan merupakan faktor penting untuk terjadinya adopsi kebijakan pengarusutamaan gender pada individu melalui proses difusi. Pengetahuan dalam arti mengetahui dan mengenal adanya perspektif gender dalam memahami ajaran Islam dan menganalisis persoalan-persoalan sosial masyarakat, serta nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan, juga pengetahuan yang bersifat teknis cara melaksanakan kesetaraan dan keadilan gender. Kesadaran pengetahuan diperoleh karena mereka aktif dalam berbagai kegiatan dan forum yang mengkomunikasikan pengarusutamaan gender. Sesuai dengan Rogers, (2003: 171) bahwa individu-individu menambah kesadaran pengetahuan (*knowledge-awareness*) tentang inovasi melalui perilaku mereka menginisiasi, sehingga individu-individu itu tidak pasif.

#### **b. Berpikir Kritis dan Melakukan Refleksi**

Kesadaran pengetahuan ini menumbuhkan persepsi pada individu dengan memberikan penilaian terhadap isu-isu kesetaraan dan keadilan gender yang diangkat oleh gerakan perempuan barat terutama mengenai hak-hak perempuan. Pada tahap ini berpikir kritis dan melakukan tindakan reflektif dilakukan oleh individu-individu. Isu-isu kesetaraan dan keadilan yang diangkat oleh gerakan

perempuan baik sebagai metode analisis sosial maupun interpretasi ajaran-ajaran Islam dinilai relevan dengan kebutuhan perempuan dan relatif memberikan keuntungan bagi perempuan. Sedangkan isu-isu gender yang berkeinginan memberikan perubahan pada ayat-ayat yang telah diyakini *qoth'i* dalam teks dinilai bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini tidak disetujui.

Faktor-faktor yang menentukan kecenderungan sikap setuju dan tidak setuju terhadap kesetaraan dan keadilan gender sebagai berikut:



Gambar 3: Faktor-faktor yang menentukan Individu bersikap setuju dan tidak Setuju terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

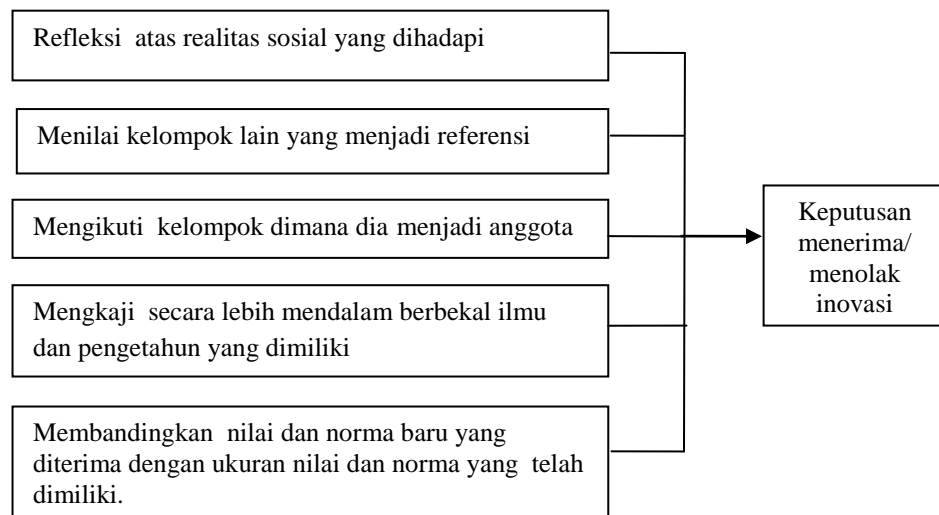
Jika pada tahap sebelumnya yang terjadi adalah proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap ini afektif atau perasaan mulai berperan untuk memberikan penilaian. Dengan berpikir dan bersikap kritis dan reflektif yang muncul dari keyakinan-keyakinan terhadap kesetaraan dan keadilan gender bergerak menjadi tindakan individu-individu. Individu-individu lalu memberikan penilaian-penilaian yang mendorong mereka untuk menunjukkan kecenderungan sikap setuju atau tidak setuju terhadap kesetaraan dan keadilan

gender dengan upaya mereka untuk menginformasikan kepada orang-orang terdekatnya. Pada tahap ini individu-individu melakukan seleksi terhadap informasi yang diterimanya disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Mereka juga berusaha mengetahui lebih banyak tentang kesetaraan dan keadilan gender dan menafsirkan informasi yang diterimanya serta mengkaji karakteristiknya. Sesuai pendapat Rogers (2000: 175-176) persepsi individu memegang peran penting dalam adopsi inovasi pada tahap persuasi. Melalui proses persepsi ini individu menunjukkan sikap setuju atau tidak setuju pada kesetaraan dan keadilan gender sebagai sebuah inovasi. Konsep kesetaraan dan keadilan gender oleh individu-individu dinilai relatif memberikan keuntungan kepada perempuan, memberikan ruang dan peluang yang lebih luas kepada perempuan.

**c. Konfirmasi untuk Penguatan Menerima atau Menolak Inovasi**

Dalam proses memutuskan menerima inovasi sebagai tujuan dari difusi, individu-individu melakukan konfirmasi untuk penguatan atas sikap mereka. Penguatan tersebut membantu individu-individu untuk meyakinkan sikap setuju atau tidak setuju mereka terhadap setiap isu-isu kesetaraan dan keadilan gender. Konfirmasi dilakukan dengan melihat kelompok lain sebagai (*reference group*). Nilai, norma dan perilaku yang dimiliki oleh kelompok lain dinilai dan ditemukan ada hal-hal baik dan ada hal-hal yang dinilainya buruk. Pada hal-hal yang dinilai baik dan dinilai benar maka ini mendorong individu untuk menerima. Sementara pada nilai, norma dan perilaku yang dinilainya tidak baik karena bertentangan dengan ajaran agama maka ditolak. Konfirmasi kepada kelompoknya (*membership groups*) dilakukan karena ia merupakan anggota dari kelompok dalam hal ini Fatayat NU. Sehingga ketika PP Fatayat NU menggulirkan kebijakan dan program untuk kesetaraan dan keadilan gender memperkuat keyakinannya untuk menerima.

Cara-cara melakukan konfirmasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4: Cara-cara Melakukan Konfirmasi yang Menentukan Keputusan Menerima atau Menolak Inovasi

Gambar di atas menunjukkan cara yang dilakukan individu dalam upaya melakukan penegasan atas sikap setuju dan tidak setuju terhadap kesetaraan dan keadilan gender yang menentukan keputusan individu menerima atau menolak inovasi. Caranya dengan melakukan refleksi atas realitas sosial yang dihadapi, menilai kelompok lain yang menjadi referensi, mengikuti kelompok dimana dia menjadi anggota (organisasi Fatayat), mengkaji secara lebih mendalam, membandingkan nilai dan norma yang dimiliki dengan nilai dan norma baru yang diterimanya. Pada tahap ini individu-individu mencari acuan atau referensi untuk mempertajam pertimbangan mereka sebelum memutuskan menerima atau menolak inovasi.

#### **d. Menginisiasi Perubahan Mulai Dari Lingkungan Terdekat**

Pada saat individu-individu membuat keputusan untuk menerima kesetaraan dan keadilan gender mereka memulai dengan aktifitas yang mengarah

untuk melaksanakan dalam kehidupannya. Aktifitas melaksanakan dimulai dari lingkungan terdekat yakni keluarga dan atau organisasi Fatayat NU dimana mereka beraktifitas kedua setelah keluarga. Aktifitas menyampaikan gagasan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan aktifitas memulai melaksanakan karena implementasi kesetaraan dan keadilan gender mengharuskan keterlibatan pihak lain yang terdekat dalam kehidupannya. Walaupun ada individu yang menerima kesetaraan gender akan tetapi tidak dapat menyampaikan kepada anggota keluarga yang lain karena hambatan situasi dan kondisi dalam keluarganya. Yang lain lagi memiliki peluang yang lebih luas, tidak memulai dari keluarga akan tetapi memberikan pengaruhnya kepada organisasi sebagai wadah untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada anggota. Memulai menginisiasi kebijakan dan program organisasi tentang kesetaraan dan keadilan gender agar dapat lebih meluaskan gagasan kesetaraan dan keadilan gender.

Keputusan menerima kesetaraan dan keadilan gender terjadi pada individu-individu ketika mereka terikat dalam aktifitas yang memandu mereka untuk melakukan aktifitas dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sebagaimana Rogers (2003, 2005: 177) menuliskan keputusan terjadi ketika individu atau unit pembuat keputusan terikat dalam aktifitas yang memandu pada pilihan mengadopsi atau menolak inovasi. Pada adopsi kebijakan pengarusutamaan gender ini nampak individu-individu menerimanya berarti memiliki niat sepenuhnya dan melakukan tindakan untuk melaksanakan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan mereka. .

Individu yang menjadi pimpinan organisasi relatif memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat dalam hal ini anggota organisasi menyadari bahwa anggota Fatayat NU masih berada dalam keterkungkungan hegemoni patriarkhi. Hal ini mendorongnya untuk menginisiasi mengimplemantasikan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender dalam skala yang lebih luas yakni menjadi kebijakan organisasi. Upayanya adalah melakukan advokasi agar isu-isu

kesetaraan dan keadilan gender dapat menjadi kebijakan organisasi Fatayat NU. Keinginan untuk memberikan perubahan pada masyarakat dengan memberikan intervensi melalui kebijakan organisasi dan tindakan aksi menjadi bagian penting dari proses adopsi dalam organisasi.

**e. Model Difusi Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Individu**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu-individu menerima kesetaraan dan keadilan gender melalui difusi dengan tahapan pengetahuan, persuasi, konfirmasi, keputusan dan implementasi. Proses mental yang terjadi pada individu-individu diawali proses kognisi, kesadaran pengetahuan terhadap informasi yang diterima menimbulkan persepsi-persepsi pada individu-individu dengan munculnya penilaian-penilaian mereka terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Penilaian-penilaian yang mereka berikan menumbuhkan proses persuasi dalam bentuk sikap setuju atau tidak setuju. Namun demikian persetujuan dan ketidaksetujuan mereka masih membutuhkan konfirmasi. Konfirmasi dibutuhkan oleh individu-individu untuk memperkuat terhadap apa yang mereka setuju untuk ditindaklanjuti dengan keputusan menerima dan mengimplementasikan kesetaraan dan keadilan gender. Penegasan juga dibutuhkan untuk memperkuat ketidaksetujuan mereka ketika menolak pada hal-hal yang dalam penilaian awal mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Ditemukan berbagai cara dalam melakukan penegasan atau konfirmasi yang dilakukan oleh individu-individu informan.

Mereka menerima konsep perspektif gender untuk analisis sosial masyarakat dan untuk menginterpretasikan kembali ayat-ayat Alquran yang selama ini diinterpretasi bias gender. Mereka juga menerima kesetaraan dan keadilan gender yang memiliki dasar hukum dalam ajaran Islam. Tetapi mereka tidak menerima upaya mengubah klasifikasi ayat-ayat Alquran dari kategori *qath'i* ke dalam kategori *dzann* kemudian menginterpretasikan ayat-ayat alquran

yang bersifat *qath'i* tersebut. Mereka juga tidak menerima isu untuk mengubah ayat yang dinilai secara tekstual bias gender.

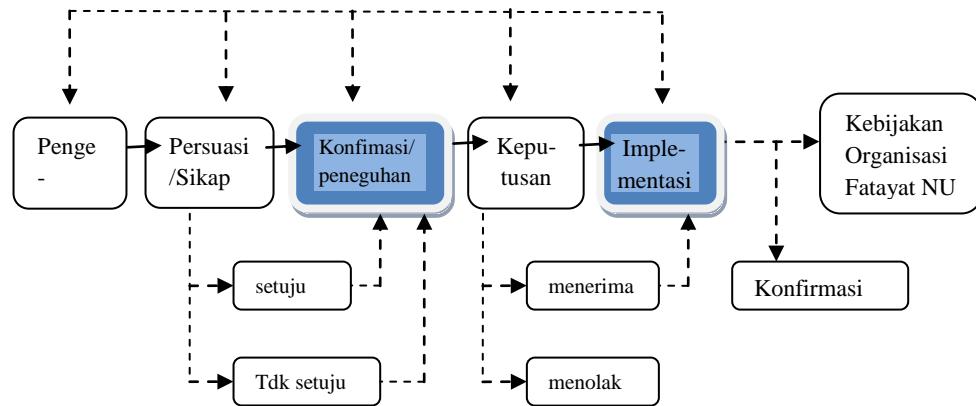
Keyakinan kebenaran terhadap informasi pada aspek kognisi dengan kesadaran pengetahuan mereka maupun afeksi yang telah mendapatkan peneguhan atau konfirmasi untuk memperkuat sikap, meyakinkan mereka untuk memutuskan menerima atau menolak bagian-bagian dari kesetaraan dan keadilan gender yang digulirkan. Pada isu-isu yang mendapat peneguhan bahwa isu tidak sejalan dengan ajaran Islam maka meyakinkan individu-individu untuk tidak menerimanya. Dengan kata lain memutuskan menolak inovasi kesetaraan dan keadilan gender yang tidak sesuai dengan nilai, norma dan keyakinan ajaran Islam.

Sedangkan pada isu-isu kesetaraan dan keadilan gender yang mendapatkan peneguhan kebenaran semakin meyakinkan mereka untuk memutuskan menerima dan mengimplementasikan melalui aktifitas tindakan mereka di kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain individu-individu memutuskan menerima inovasi yang sesuai dengan nilai, norma dan keyakinan dalam Islam. Keputusan menerima inovasi kesetaraan dan keadilan gender dilanjutkan dengan tindakan nyata untuk mewujudkan dalam lingkungan terdekat mereka yakni keluarga atau organisasi Fatayat NU. Hanya saja untuk menjadi kebijakan dan program organisasi Fatayat NU dilakukan peneguhan atau konfirmasi kepada Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induknya.

Difusi isu-isu kesetaraan dan keadilan gender dapat digambarkan dalam model difusi inovasi pada level individu. Model yang ditemukan ini dengan tahap pengetahuan, persuasi, konfirmasi, keputusan dan implementasi. Kemudian ketika individu-individu akan melakukan penyebarluasan (difusi) dalam organisasi atau melalui organisasi mereka melakukan konfirmasi kembali. Konfirmasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan peneguhan dari organisasi induk (Nahdlatul Ulama) agar organisasi Fatayat NU direstui untuk melakukan difusi



pada level organisasi. Tahap dalam model ini berbeda dengan model difusi pada individu yang dikemukakan oleh Rogers yang dengan tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi.



Gambar 5: Model Difusi Inovasi pada Individu

## 2. Refleksi terhadap Metode Penelitian Difusi pada Individu

Refleksi terhadap metode penelitian difusi kebijakan PUG pada individu merupakan refleksi metodologis. Peneliti menilai hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengembangkan metode penelitian difusi kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada individu-individu tokoh atau pemimpin organisasi Fatayat NU yang berperan sebagai agen perubahan dalam organisasi khususnya dan masyarakat umumnya. Sehingga metode yang dihasilkan dalam refleksi ini relevan untuk meneliti individu yang berperan sebagai agen perubahan bukan individu sebagai pengikut pada tataran akar rumput (*grassroot*).

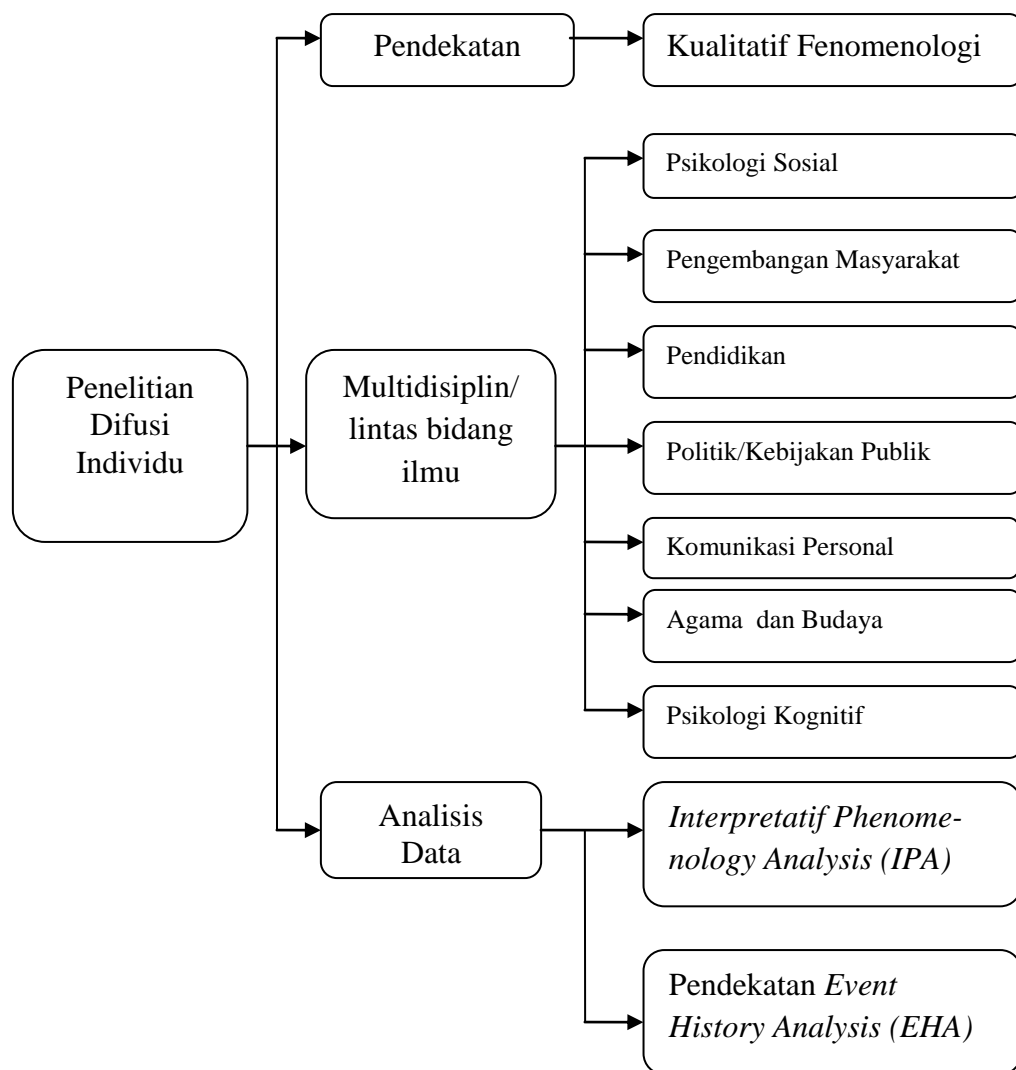
Penelitian difusi kesetaraan dan keadilan gender pada individu menggambarkan sebuah proses perubahan yang sangat kompleks. Realitas perubahan kognisi dan perilaku pada individu-individu dari kultur patriarki kepada kultur yang setara dan adil gender mampu membangun pribadi-pribadi yang progresif. Pribadi yang lepas dari keterungkungan berpikir dan bertindak menjadi pribadi yang kritis dan memiliki kebebasan yang dibingkai oleh nilai, norma dan

keyakinan Agama Islam. Kompleksitas ditemukan dalam penelitian difusi adalah dalam analisis membutuhkan kajian dari berbagai disiplin ilmu.

Penelitian pada individu untuk memahami secara mendalam proses menerima (adopsi) sebuah gagasan baru atau kebijakan baru merupakan proses yang kompleks. Penelitian difusi pada individu bermakna memahami proses mental yang terjadi. Menggambarkan proses mental pada individu-individu dalam penelitian difusi lebih tepat jika dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat mengeksplorasi proses mental pada setiap individu-individu dan menemukan tema-tema yang muncul dalam proses mental tersebut. *Interpetative Fenomenology Analysis* yang dikemukakan oleh Smith (2010) dengan individu-individu sebagai unit analisisnya. Individu sebagai unit analisis dalam penelitian difusi menjadi keharusan. Karena individu atau orang (*people*) merupakan salah satu dari tiga dimensi dalam implementasi kebijakan disamping tempat (*place*) dan kebijakan (*policies*).

Pentingnya unit analisis individu ini didukung oleh tulisan Honig (2006:17) menyatakan bahwa orang-orang (*peoples*) merupakan mediator yang signifikan dalam difusi dan implementasi dengan cara-cara yang bervariasi menjadi pusat dalam studi difusi maupun implementasi kebijakan. Individu atau orang dalam penelitian difusi dikelompokkan menjadi 5 yakni sebagai target formal dari kebijakan, target non formal di kebijakan, sub grup dalam kategori profesional, komunitas dan sebagai pembuat kebijakan. Dimensi orang dengan ke dua dimensi lainnya *place* dan *policy* secara bersama akan membentuk kerangka pemikiran sebagai proses dari situasi yang sangat tidak terduga. Oleh karena itu analisis terhadap individu juga tidak terlepas dari konteks tempat difusi terjadi dan kebijakan yang didifusikan. Penguasaan terhadap konsep dan metode penelitian difusi kebijakan sangat diperlukan bagi peneliti.

Kompleksitas penelitian difusi adopsi kebijakan pada individu atau pada Individu dapat dilihat gambar 6 .



Gambar 6: Kompleksitas Penelitian Difusi Adopsi pada Individu

Dalam penelitian difusi kebijakan dapat mengembangkan berbagai penelitian yang dapat menjelaskan bagaimana kebijakan baru dapat diimplementasikan atau tidak dapat diimplementasikan. Kebijakan baru dapat diimplementasikan manakala individu-individu dalam sistem sosial atau organisasi menerima (mengadopsi) inovasi kebijakan baru tersebut. Kebijakan baru tidak dapat diimplementasikan salah satu alasannya manakala individu-individu dalam sistem sosial atau organisasi cenderung menolak inovasi tersebut. Oleh karenanya

dalam penelitian implementasi penting melakukan pula penelitian difusi kebijakan baru tersebut. Fokus penelitian difusi pada seberapa ketahanan dari desain kebijakan baru dan tanggung jawab individu-individu untuk mengimplementasikan kebijakan baru dalam sistem sosial dimana ia berada seperti institusi, sekolah, organisasi atau masyarakat tertentu.

Studi difusi membutuhkan pemahaman secara mendalam pada perubahan yang terjadi pada setiap individu-individu dengan diterimanya informasi baru baik dalam kognisi maupun perilaku sehingga penelitian dengan pendekatan kuantitatif tak cukup bisa menjawab persoalan ini. Selain itu untuk memahami difusi yang terjadi dalam proses mental individu membutuhkan kajian dari multi disiplin keilmuan. Berbagai bidang ilmu yang dibutuhkan untuk memahami proses difusi inovasi pada individu yakni ilmu komunikasi, psikologi, agama dan budaya masyarakat, politik, kebijakan, juga pendidikan. Ilmu pendidikan ini penting mengingat proses mendasar dalam difusi sebenarnya adalah proses belajar individu terhadap inovasi yang dinilainya sebagai baru dan relevan baginya untuk diadopsi.

Penelitian difusi pada individu memperhatikan individu-individu adopter dalam proses menerima atau menolak inovasi. Bagaimana individu-individu menerima informasi mengenai inovasi dan mengalami proses mental dalam dirinya sehingga menyatakan menerima atau menolak inovasi dan menunjukkan aktifitas untuk melaksanakan inovasi merupakan *core* dari penelitian pada individu. Hal ini relevan dengan yang dituliskan oleh Spillane et al (2006: 48) bahwa penting untuk memperhatikan kerangka kognisi individual selain dari kerangka kognisi sosial dalam studi difusi kebijakan. Kognisi merupakan lensa yang esensial untuk memahami implementasi kebijakan, terutama implementasi kebijakan yang membutuhkan perubahan yang signifikan dalam kebiasaan. Honig, 2006:17 menyatakan individu-individu merupakan mediator yang signifikan dalam difusi dan implementasi dengan cara-cara yang bervariasi. Individulah sebenarnya yang menjadi pusat dalam studi difusi maupun implementasi kebijakan.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kebijakan yang membutuhkan perubahan pada kebiasaan individu-individu baik kebiasaan berpikir, sikap maupun perilaku. Oleh karena itu penggunaan perspektif kognitif sebagaimana yang dikemukakan oleh Spilane untuk memahami difusi kesetaraan dan keadilan gender fokus pada pentingnya distribusi perspektif kognitif dari individu-individu. Analisis perspektif ini membutuhkan pemahaman bidang ilmu psikologi terutama psikologi kognisi, psikologi perilaku dan psikologi sosial. Psikologi membantu memahami proses pembentukan sikap-sikap dan perilaku pada individu-individu serta bagaimana proses individu dipengaruhi dan mempengaruhi individu lainnya di dalam kelompok maupun diluar kelompok. Ilmu komunikasi juga penting untuk memahami difusi kebijakan karena pada dasarnya difusi merupakan bagian dari bidang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi membahas difusi kebijakan pengarusutamaan gender dari sudut pandang komunikasi personal yang terjadi pada individu-individu

Difusi inovasi dalam masyarakat juga penting dipandang dari proses intervensi yang dilakukan oleh kelompok agent perubahan. Bahwa sasaran agen perubahan adalah individu-individu yang memiliki kapasitas sebagai orang-orang yang diharapkan mampu memberikan pengaruh dan perubahan (menjadi agen perubahan). Pemimpin atau tokoh-tokoh organisasi dalam penelitian menjadi sasaran agen perubahan global pada akhirnya menjadi agen perubahan dalam organisasi dan masyarakat di sekitarnya. Memahami masyarakat sebagai konteks perubahan individu-individu dan juga proses individu-individu tokoh atau pemimpin lokal memberikan perubahan juga menjadi bagian penting dalam studi terhadap proses difusi dalam masyarakat atau institusi. Untuk membahas hal tersebut ilmu tentang pengembangan masyarakat (*community development*) sangat diperlukan. .

Di dalam proses difusi terjadi proses belajar individu-individu terhadap inovasi yang digulirkan. Dalam kerangka ini penting pemahaman dari sudut

pandang pendidikan terutama andragogi mengingat difusi kebijakan terjadi pada orang-orang dewasa dan proses belajar terjadi oleh karena kebutuhan pembelajar akan perubahan. Juga konsep pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (masyarakat) merupakan bagian penting dalam memahami difusi kesetaraan dan keadilan gender. Konsep kesetaraan dan keadilan gender justru dimulai dari aktifitas pendidikan non formal karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Jaringan non formal dalam masyarakat lebih mendominasi.

Setiap individu akan mengalami proses yang berbeda dan unik serta memiliki alasan mengapa mereka menerima atau menolak inovasi. Oleh karena itu peneliti difusi penting untuk memahami latar belakang agama dan budaya masyarakat dimana difusi inovasi di gulirkan. Bagaimanapun nilai-nilai dan norma-norma agama bagi individu maupun masyarakat menjadi dasar bagi mereka untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Agama dan budaya yang diikuti menjadi faktor penentu bagi diterima atau ditolaknya sebuah inovasi gagasan, program maupun kebijakan. Bidang ilmu agama dan budaya masyarakat harus dimiliki oleh peneliti difusi.

Studi difusi inovasi tidak terlepas dari konstelasi politik negara, apalagi inovasi kebijakan publik. Pemahaman terhadap situasi politik saat terjadinya difusi inovasi juga menjadi bagian penting untuk memahami proses difusi. Juga pemahaman terhadap proses kebijakan. Studi difusi kebijakan merupakan bagian dari studi implementasi kebijakan yang merupakan bidang ilmu kebijakan. Jika keberhasilan implementasi kebijakan yang diharapkan maka memahami ilmu tentang kebijakan akan menjadi pendukung dalam studi difusi kebijakan.

### **Simpulan.**

Terdapat dua sumber informasi pengarusutamaan gender pada individu yakni sumber informasi individual dalam bentuk dua saluran yakni intrapersonal dalam pelatihan dan media dalam bentuk buku dan novel. Respon awal yang diberikan cukup bervariasi dari bingung, ragu-ragu, menolak, takut, dan ada juga yang langsung

menerima karena gagasan kesetaraan dan keadilan gender dinilai dan dirasakan sebagai sesuatu yang baik, memberikan peluang dan memberikan pencerahan pada diri mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model difusi kebijakan pada individu ditemukan dengan tahap pengetahuan, persuasi, konfirmasi, keputusan dan implementasi.

Penelitian difusi kesetaraan dan keadilan gender individu untuk memahami secara mendalam proses menerima (adopsi) sebuah gagasan baru atau kebijakan baru merupakan proses yang kompleks yang membutuhkan kajian interdisipliner berbagai bidang ilmu. Dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat mengeksplorasi proses mental pada setiap individu-individu dan menemukan tema-tema yang muncul dalam proses mental dengan analisis fenomenologi interpretatif (*Interpretative Phenomenology Analysis*). Difusi selalu terikat dengan durasi waktu tertentu hingga terjadi adopsi. Inovasi. Oleh karena itu penggunaan *Event History Analysis (EHA)* dibutuhkan dalam penelitian difusi. Individu sebagai unit analisis dalam penelitian difusi menjadi keharusan karena individu atau orang (*people*) merupakan salah satu dari tiga dimensi dalam implementasi kebijakan disamping tempat (*place*) dan kebijakan (*policies*).

### **Daftar Pustaka**

- Ann Stewart. 2004. *Aspiration to action: 25 years of the women's convention (Cedaw)*. United Kingdom: British Council.
- Damanpour, Fabrizio. 1996. Organizational and innovation: Developing and testing multiple contingencies. *Journal of Management Science*, Vol. 42. No. 5 (May, 1996). Pp. 694-716. Published by [www.jstor.org/stable/2634460](http://www.jstor.org/stable/2634460).
- Havelock, Ronald G. (ed.). *Planning for innovation: Through dissemination and utilization of knowledge*. Michigan: Center for Research on Utilization of Scientific Knowledge.
- Honig, Meredith I. 2006. Complexity and policy implementation challenge and opportunity for the field. Book chapter in *New directions in education policy implementation: confronting complexity*. New York: State University of New York.
- Honig, Meredith I. (Editor). 2006. *New directions in education policy implementation: confronting complexity*. New York: State University of New York.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) NOMOR 9 TAHUN 2000 (9/2000)  
Tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
- Minister of Women Empowerment. 2002. *The Manual of implemetation guidelines on gender mainstreaming in national development*. as an annex of Circular of Minister of Women Empowerment no. B-89/Men.PP/Dep.II/IX/2002, dated September 4, 2002.
- Ostrom, Elionor. 2007. Institutionsl rational choice: An assesment of the institutional analysis and development framework. *Book chapter. In theories of the policy process*. Ed. Paul Sabatier. California: Westview Press..
- Rogers, Everett M. 1995. 2003. *Diffusion of innovations*. New York: The Free Press
- Sabatier, Paul A. (Editor). 2007. *Theories of the policy process*. California: Westview Press.
- Sabatier, Paul A. 2007. The need for better theories. *Book chapter in Theories of The Policy Process*. Edited by Paul Sabatier. California: Westview Press.
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. 2009. *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.
- Smith, Jonathan A. (ed.). 2009. *Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset*. Terjemahan dari *Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Spillane, James. P., Reiser, Brian J., Gomez, Louis M. 2008. Policy implementation and cognition: The role of human, social, and distributed cognition in framing policy. *Book chapter in New directions in education policy implementation: confronting complexity*. New York: State University of New York.
- Walker, Jack L. 1969. The diffusion of innovation among the American States. *The American Political Science Review*, Vol.63, No. 3 (Sept. 1969), 880-899. Published by: American Political Science Association Stable URL: <http://links.jstor.org/>
- Yalcinkaya, Goksel. 2007. Understanding the emergence of aggregate level innovation diffusion through individual level. *Dissertation*. USA: Michigan State University. Publish by: [gradworks.umi.com/32/82/3282232.html](http://gradworks.umi.com/32/82/3282232.html)